

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, industri pariwisata telah berkembang secara pesat menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan terpenting di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, perubahan gaya hidup, serta kemajuan teknologi telah mendorong permintaan akan pengalaman berwisata yang lebih luas dan beragam. Sebagai hasilnya, destinasi wisata di seluruh dunia mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan dan menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan pendapatan suatu negara.

Industri pariwisata juga telah menjadi pusat perhatian bagi banyak negara yang berupaya meningkatkan daya tarik wisata mereka melalui investasi dalam promosi pariwisata, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan. Seperti yang dicatat oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) sendiri, bahwa selama bertahun-tahun semakin banyak destinasi dan negara yang membuka diri terhadap pariwisata dan berinvestasi dalam perkembangannya, mereka menjadikan industri pariwisata sebagai faktor kunci kemajuan ekonomi negara-Nya (Eberle, 2019).

Menurut laporan statistik (2018), benua Eropa dipastikan menjadi benua pertama di dunia yang menerima setengah dari jumlah kedatangan internasional di seluruh dunia. Hal ini terutama didasarkan pada tiga poin



kuat, yaitu warisan budaya, keragaman negara dan kualitas penawarannya. Saat ini, kota-kota di benua Eropa dengan daya tarik utama mereka, seperti pusat sejarah, monumen dan pemandangan sangat dipengaruhi oleh wisatawan, kota-kota di Eropa dengan cepat dibanjiri oleh kerumunan besar pengunjung yang tidak terkendali (Eberle, 2019). Banyaknya jumlah wisatawan yang datang secara berlebihan menyebabkan suatu daerah atau destinasi mengalami kepadatan penduduk dan kelebihan beban wisata karena melebihi kapasitas yang dapat mereka tampung, hal inilah menjadi penyebab utama terjadinya *overtourism*.

Overtourism adalah fenomena kompleks yang sangat mempengaruhi kelayakan hidup suatu tempat, serta pengalaman penduduk, pengunjung, dan pemangku kepentingan yang berbeda yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan atau dipengaruhi oleh pariwisata (Peeters et al, 2018). Istilah “*overtourism*” sendiri mengacu pada kepadatan penduduk dan kelebihan beban tujuan wisata karena meningkatnya jumlah wisatawan (Eberle, 2019). *Overtourism* ini adalah konsep yang relatif baru yang telah muncul sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di seluruh dunia.

Overtourism menggambarkan situasi dimana dampak pariwisata, pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi kemampuan fisik, ekologi, sosial, ekonomi, dan sudah diambang batas kapasitas psikologis, dan/atau politik. Pada hakikatnya, fenomena *overtourism* dikaitkan dengan jumlah wisatawan, jenis dan kerangka waktu kunjungan mereka, dan daya



dukung destinasi. Perspektif *overtourism* dapat mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti para penduduk, wisatawan, ataupun pengusaha bisnis (Peeters et al, 2018).

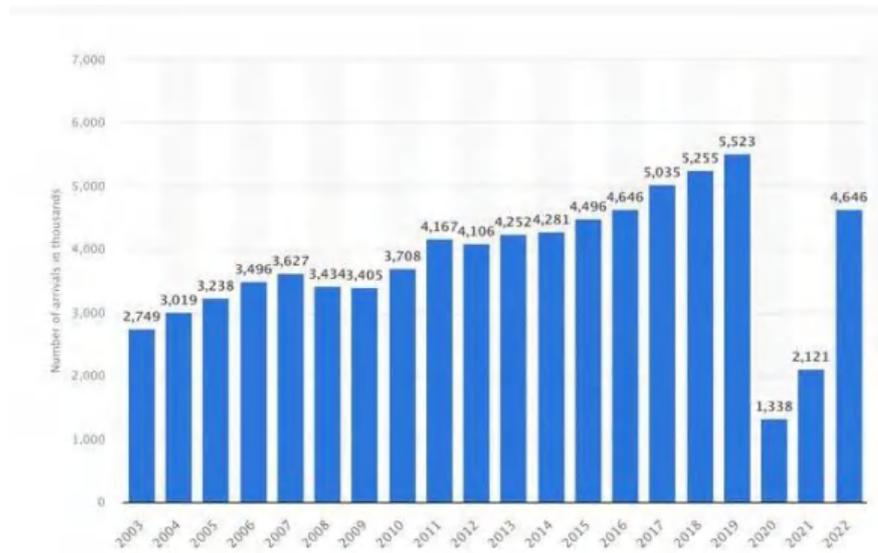
Terdapat beberapa tantangan yang timbul dari terjadinya fenomena *overtourism* ini, namun, tantangan atau dampak dari segi sosial budaya, ekonomi, dan bahkan lingkungan merupakan suatu aspek penting yang sangat terkena dampaknya oleh terjadinya fenomena ini. Oleh karena itu, UNWTO (2018) mendefinisikan fenomena “*overtourism*” ini sebagai dampak pariwisata pada suatu tujuan, atau bagian daripadanya, yang secara berlebihan mempengaruhi persepsi kualitas hidup warga negara dan/atau kualitas pengalaman pengunjung dengan cara yang negatif. UNWTO (2018) berpendapat, bahwa hal ini diakibatkan oleh kurangnya manajemen dan pengembangan pariwisata yang tidak terkendali (Peeters et al, 2018).

Konsekuensi paling parah dari terjadinya wisata yang berlebihan ini dialami oleh kota Venesia di Italia, yang dikenal sebagai ibu kota *overtourism*. Kota Venesia telah menjadi magnet wisata sejak lama. Di akhir abad ke-18, penduduk kota Venesia sudah mengeluh tentang kepadatan penduduk yang terjadi di kota mereka. Sejak dua dekade, namun, pariwisata di kanal Italia dan warisan kota telah meledak. Antara tahun 2005 dan tahun 2015 jumlah wisatawan yang menginap per tahun di kota Venesia naik dari 7,5 juta menjadi lebih dari 10 juta wisatawan. Yang lebih signifikan lagi, pada tahun 2017, kota ini dikunjungi oleh 35 juta wisatawan



harian (dengan jumlah 260.000 keseluruhan penduduk lokal pada tahun 2017 tersebut) (Nolan dan Séraphin, 2019).

Gambar 1. 1 Jumlah kedatangan wisatawan internasional di Venesia, Italia



(Sumber : Statista Research Department, 2023).

Seperti yang dapat dilihat dari gambar data statistik di atas mengenai jumlah kedatangan wisatawan yang datang ke kota Venezia, dapat disimpulkan bahwa kedatangan jumlah wisatawan yang datang mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2019 sangatlah signifikan dan rata-rata tetap naik setiap tahunnya yaitu mulai dari angka 2,7 juta hingga mencapai 5,2 juta wisatawan, kemudian diketahui juga bahwa jumlah kunjungan wisatawan internasional ke kota Venesia, kembali meningkat pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan tajam akibat merebaknya pandemi virus corona (COVID-19). Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, jumlah kunjungan wisatawan ke kota ini masih berada di bawah tingkat sebelum pandemi, yakni sekitar 4,6 juta wisatawan internasional (dengan jumlah



sekitar 250.000 secara keseluruhan penduduk lokal pada tahun 2022 di kota Venesia) (Statista Research Department, 2023).

Salah satu peristiwa penting yaitu Karnaval di Venesia, Italia, menarik ribuan wisatawan. Meskipun tanggal acara berubah setiap tahun, festival ini biasanya diadakan antara awal Februari dan awal Maret. Namun, karena pandemi virus corona (COVID-19), Karnaval harus dibatalkan pada tahun 2020 dan baru berlangsung secara online pada tahun 2021. Untuk edisi 2023, jumlah pengunjung ke kota Italia pada bulan Februari secara signifikan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan melampaui tingkat pra-pandemi. Tahun 2023, kota Venesia di bagian pusat sejarahnya menyambut hampir 335.000 kedatangan wisatawan domestik dan internasional pada bulan Februari (dengan jumlah 49.000 penduduk lokal di bagian pusat sejarah tersebut). Pada tahun 2023, Karnaval Venesia berlangsung dari tanggal 4 hingga 21 Februari (Lopez, 2024).

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi terkait kota Venesia ini bahwa pada tahun 1987, kota Venesia terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO (Casagrande, 2016). *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mendefinisikan warisan dunia sebagai pengakuan untuk tempat-tempat di seluruh dunia yang memiliki nilai universal yang sangat penting bagi umat manusia. Oleh karena itu, tempat-tempat yang dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia perlu untuk dilindungi dan dilestarikan, sehingga generasi mendatang dapat menghargai dan menikmatinya (Pech, 2022).



Venesia dan lagunanya, yang ditempatkan pada daftar UNESCO pada tahun 1987, merupakan sebuah tempat yang benar-benar unik di dunia. Kota Venesia memiliki daya tarik yang luar biasa untuk sejarah, arkeologi, perkotaan, arsitektur, artistik dan warisan budaya, yang terintegrasi dengan sangat baik ke dalam alam lingkungan. Laguna Venesia adalah salah satu contoh yang paling luar biasa dari interaksi kompleks antara manusia (dan aktivitas antropologis mereka) dan alam. Fenomena alam yang terjadi antara bulan Oktober dan April, dikenal sebagai perairan tinggi (Italia: aqua alta) adalah ancaman utama bagi kelangsungan hidup kota yang luar biasa (Kryczka, 2019).

Namun, Venesia harus mengatasi tantangan lain yaitu berkembangnya industri pariwisata secara pesat. Popularitas kota sebagai tujuan wisata dapat dikaitkan dengan daya tarik budaya dan sejarahnya yang unik, seperti kanal, jembatan, dan kaya dengan arsitektur yang memukau, serta lokasinya yang unik di jaringan kanal. Namun, ukuran kota yang kecil dan infrastruktur yang rapuh sudah tidak dapat lagi menampung jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahun (Kryczka, 2019).

Diperkirakan bahwa pusat sejarah kota Venesia dikunjungi oleh sekitar 70.000 - 80.000 orang per hari (dengan jumlah 55.000 penduduk lokal yang tinggal di bagian pusat sejarah tersebut). Pada saat terjadi peristiwa-peristiwa besar, jumlah wisatawan bertambah berkali-kali lipat.

ontohnya, yaitu selama musim karnaval, jumlah wisatawan yang berkunjung yaitu sekitar 120.000 orang per hari; selama terjadinya *Regata*



Storica (lomba perahu terpenting di Venesia) jumlah wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 100.000 orang per hari dan selama terjadinya Festival Film Internasional jumlah wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 300.000 orang per harinya. Dikutip dari Tattara dalam Kryczka (2019), antara bulan April dan Oktober, kota ini diakses oleh sekitar 140.000 orang dan 6 hingga 8 kapal pesiar besar (masing-masing kapal dengan jumlah 3.000 - 3.500 orang penumpang). Diperkirakan jumlah pengunjung yang datang ke Venesia akan tumbuh lebih dari 20 juta menjadi 38 juta pengunjung pada tahun 2025 (Kryczka, 2019).

Terdapat banyak kapal pesiar penumpang dan wisatawan yang menginap di akomodasi di luar Venesia. Pada saat yang sama, semakin banyak penduduk yang memutuskan untuk meninggalkan pusat kota dan pindah ke tempat lain, hingga akhirnya kota Venesia mengalami penurunan populasi untuk waktu yang lama. Penurunan populasi ini tidak terjadi hanya karena kenaikan harga rumah, tetapi juga karena perasaan ketidakpuasan di antara banyak penduduk setempat. Mereka memiliki pendapat negatif tentang wisatawan dan merasa bahwa kota mereka telah diambil alih oleh para wisatawan yang berkunjung. Faktanya, *overtourism* telah merusak laguna dan warisan kota Venesia yang dibangun, sehingga justru menghancurkan daya tarik yang dicari oleh para pengunjung (Hospers, 2019).



Dikarenakan banyaknya persoalan yang terjadi, pada tahun 2017, UNESCO telah mempertimbangkan untuk menempatkan kota Venesia di

Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya. Alasan untuk keputusan ini adalah kerentanan Venesia yang tinggi karena naiknya permukaan laut dan strategi pariwisata yang tidak berkelanjutan, termasuk konsekuensi lingkungan dan sosial yang berdampak negatif dikarenakan *overtourism*. Menempatkan Venesia di Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya akan mensyaratkan bahwa kota ini terdaftar di antara situs-situs yang terkena dampak perang atau alam bencana (Seraphin et al., 2018; Trancoso González, 2018). Dimasukkannya suatu tujuan atau destinasi dalam daftar ini adalah tanda bahwa nilai situs tersebut sebagai Situs Warisan Dunia berada di bawah ancaman yang menarik perhatian internasional terhadap masalah situs (UNESCO World Heritage Convention, n.d.). Namun dikutip pada Husain (2021), pada tahun 2021, kota Venesia nyaris menghindar dari dimasukkannya ke dalam daftar Situs Warisan Dunia dalam Bahaya oleh UNESCO, hal tersebut dilakukan oleh para pemerintah Italia dengan cara melarang kapal pesiar besar memasuki laguna. Namun demikian, kota Venesia harus mempresentasikan rencana yang diperbarui pada akhir 2022 tentang cara melindungi kota Venesia dari *overtourism* (Pech, 2022).

Menyadari urgensi untuk menangani masalah ini, pemerintah Italia telah mengambil langkah-langkah proaktif melalui kerja sama internasional, dimana melalui kerja sama internasional pemerintah Italia berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan. Kerja sama internasional ini bertujuan untuk menciptakan strategi efektif yang tidak



hanya mengurangi dampak *overtourism* tetapi juga memastikan bahwa Venesia tetap menjadi destinasi wisata yang terjaga keindahannya dan keunikannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini melalui sebuah penelitian yang berjudul, “***UPAYA PEMERINTAH ITALIA MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGELOLA OVERTOURISM DI KOTA VENESIA***”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis upaya pemerintah Italia dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia melalui kerja sama internasional, serta dampak dari upaya tersebut. Fokus utama mencakup upaya-upaya macam apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Italia dengan organisasi global maupun negara lainnya melalui kerja sama internasional untuk mengelola *overtourism* di kota Venesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana dampak dari upaya tersebut, dengan menilai efektivitas upaya dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya pemerintah Italia melalui kerja sama internasional dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia ?



2. Bagaimana dampak dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Italia melalui kerja sama internasional dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Italia melalui kerja sama internasional sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif *overtourism* terhadap kualitas hidup penduduk setempat, pengalaman pengunjung, infrastruktur, kerusakan alam, serta warisan dan budaya di kota di Venesia.
2. Untuk menguraikan bagaimana dampak dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Italia dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia melalui kerja sama internasional.

Manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi berupa informasi dan pengetahuan tambahan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa dan dosen hubungan internasional, serta masyarakat umum yang ingin memahami dan mengkaji lebih dalam tentang entuk kerja sama internasional antara suatu negara dengan organisasi internasional atau negara lain serta dampaknya dalam mengelola isu-isu di dinamika politik lingkungan internasional, terutama mengenai *overtourism* di Kota Venesia, Italia.



2. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi setiap aktor dalam hubungan internasional, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Konseptual

1. Kerja sama Internasional (*International Cooperation*)

Konsep kerja sama internasional, khususnya dalam literatur hubungan internasional, membahas bagaimana kerja sama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis (Paulo, 2014). Menurut K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul "*International Politics: A Framework for Analysis*" (1998), kerja sama internasional merupakan sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh suatu negara bersama negara-negara lain untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Setiap pihak atau negara yang terlibat akan mulai mendekati satu sama lain, kemudian melakukan perundingan, bernegosiasi, dan mencari faktor-faktor penting yang dapat menjadi solusi terbaik bagi masing-masing pihak (Arini & Hartati, 2021). Kerja sama internasional ini mencakup interaksi antara berbagai jenis aktor, tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga trans-nasional, dan terjadi dalam berbagai skala seperti kerja sama bilateral, multilateral, regional, global, dan sebagainya (Paulo, 2014).



Koesnadi dalam Arini & Hartati (2021) menjelaskan bahwa kerja sama internasional terjadi sebagai hasil dari hubungan internasional dan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat internasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerja sama internasional meliputi:

- a) Kemajuan teknologi yang mempermudah hubungan antar negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu sama lain.
- b) Perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa, dimana kesejahteraan satu negara dapat berdampak pada kesejahteraan negara lain di dunia.
- c) Perubahan sifat peperangan, yang menciptakan keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri melalui kerja sama internasional.
- d) Kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi yang memudahkan penyelesaian masalah bersama (Arini & Hartati, 2021).

Istilah "kerja sama internasional" kini mencakup semua bidang, mulai dari perdagangan dan keuangan hingga keamanan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan. Semua aspek ini merupakan suatu hal yang penting dalam agenda internasional dan merupakan aspek pembangunan yang tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa dalam bidang-bidang ini koneksi dengan cakupan internasional adalah faktor penentu yang mendasar. Oleh karena itu, kerja sama internasional dapat dipahami



sebagai aspek jangka panjang dari kebijakan luar negeri. Program kerja sama internasional memungkinkan terbentuknya praktik dan institusi yang memberikan konsistensi, stabilitas, dan keamanan dalam hubungan luar negeri suatu negara. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam hubungan internasional saat ini, peran lembaga non-pemerintah semakin meningkat, dan melalui program kerja sama ini, banyak ruang terbuka sehingga aktor non-negara dan lembaga sub-nasional dapat terlibat dalam hubungan luar negeri suatu negara. Negara, pemerintah daerah, bahkan kelompok yang mewakili segmen-segmen masyarakat dapat mengembangkan inisiatif, tindakan, dan kerja sama politik dengan agen-agen di tingkat internasional (Sato, 2010).

Kerja sama internasional, tidak hanya mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu, mengikuti perubahan dalam skenario hubungan internasional, tetapi juga telah menetapkan dirinya sebagai komponen kunci dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Untuk sebagian besar, kerja sama inilah yang memungkinkan pembangunan dunia yang terglobalisasi, dimana pengetahuan dan penggunaan secara bersama dan sejalan dalam berbagai aktivitas teknis memainkan peran sentral. Sambil berfungsi sebagai instrumen yang mampu menciptakan standar perilaku dan prosedur teknis yang tersebar di berbagai masyarakat di seluruh benua dan wilayah, kerja sama akan diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri jangka panjang suatu negara (Sato, 2010).



Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Italia melalui kerja sama internasional dengan organisasi internasional dan negara-negara lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk mengelola dampak yang ditimbulkan oleh fenomena *overtourism* di kota Venesia, Italia. Penelitian ini akan menganalisis berbagai kebijakan dan inisiatif yang diimplementasikan dalam rangka pelestarian warisan budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

2. *Overtourism*

Istilah "*overtourism*" telah digunakan untuk menggambarkan fenomena baru atau belakangan ini yang erat kaitannya dengan perkembangan pariwisata selama beberapa dekade terakhir, serta dampak yang berkembang yang dihasilkan oleh pariwisata dalam hal konsentrasi arus wisatawan di beberapa tujuan wisata utama di seluruh dunia dan masalah yang terkait dengan tata kelola fenomena pariwisata tersebut (Capocchi, 2019).

Goodwin dalam Capocchi (2019) menjelaskan konsep *overtourism* sebagai situasi dimana baik penduduk lokal maupun wisatawan merasa bahwa suatu tempat telah menjadi terlalu sering dikunjungi dan akibatnya mengubah karakteristiknya, kehilangan keasliannya terutama bagi wisatawan, dan menyebabkan gangguan terutama bagi penduduk setempat (Capocchi, 2019).



Overtourism adalah fenomena kompleks yang sangat mempengaruhi kelayakan hidup suatu tempat, serta pengalaman penduduk, pengunjung, dan pemangku kepentingan yang berbeda yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan atau dipengaruhi oleh pariwisata (Peeters et al, 2018). Istilah "*overtourism*" sendiri mengacu pada kepadatan penduduk dan kelebihan beban tujuan wisata karena meningkatnya jumlah wisatawan (Eberle, 2019). *Overtourism* ini adalah konsep yang relatif baru yang telah muncul sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di seluruh dunia.

Overtourism menggambarkan situasi dimana dampak pariwisata, pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi kemampuan fisik, ekologi, sosial, ekonomi, dan sudah diambang batas kapasitas psikologis, dan/atau politik. Pada hakikatnya, fenomena *overtourism* dikaitkan dengan jumlah wisatawan, jenis dan jangka waktu kunjungan mereka, serta daya dukung destinasi. Perspektif *overtourism* dapat mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti para penduduk, wisatawan, ataupun pengusaha bisnis (Peeters et al, 2018).

Menurut sebuah studi (McKinsey & Company & World Travel & Tourism Council, 2017), terdapat beberapa tantangan yang timbul dari terjadinya *overtourism* ini yaitu penduduk lokal yang terasing, pengalaman wisata yang menurun, infrastruktur yang kelebihan beban, kerusakan alam, atau ancaman terhadap budaya dan warisan (Peeters et al, 2018). *Overtourism* dapat menimbulkan dampak fisik yang negatif



terhadap suatu kota. Dampak ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti kerusakan pada lingkungan yang dibangun, lokasi warisan dan juga ekosistem. Tingginya volume pengunjung dapat menyebabkan kemacetan, polusi, dan kerusakan sumber daya alam dan budaya, serta meningkatkan biaya hidup bagi penduduk setempat. Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya konflik antara penduduk lokal dan wisatawan. Oleh karena itu, *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) dalam laporannya yang berjudul “*Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions*“ (2018), mendefinisikan fenomena "*overtourism*" ini sebagai dampak pariwisata pada suatu tujuan, atau bagian daripadanya, yang secara berlebihan mempengaruhi persepsi kualitas hidup warga negara dan/atau kualitas pengalaman pengunjung dengan cara yang negatif.

Dalam laporan UNWTO tersebut, *overtourism* lebih lanjut dijelaskan sebagai urbanisasi yang cepat, atau pertumbuhan sektor pariwisata yang dipimpin oleh pembangunan ekonomi, biaya transportasi yang lebih rendah, fasilitas perjalanan, dan munculnya kelas menengah di negara-negara maju dan berkembang yang telah membuat kota-kota semakin populer sebagai tujuan bagi turis bisnis dan rekreasi. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa kurangnya manajemen yang baik dan pengembangan pariwisata yang tidak terkontrol adalah alasan utama dari fenomena *overtourism*. Laporan



UNWTO dengan jelas menyatakan bahwa pariwisata harus dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan baik bagi para pengunjung maupun komunitas lokal, karena pariwisata adalah peluang bagi komunitas dan penduduknya untuk membagi manfaatnya, itulah mengapa hubungan antara sektor pariwisata dan komunitas perlu diperkuat (Capocchi, 2019).

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus untuk membahas fenomena *overtourism* yang terjadi di kota Venesia, Italia. Kota Venesia telah menerima konsekuensi paling parah dari terjadinya wisata yang berlebihan ini, sehingga kota Venesia disebut sebagai ibu kota dari fenomena *overtourism*. Kota Venesia yang awalnya dimasukkan ke daftar situs warisan dunia oleh UNESCO kini terancam akan ditempatkan ke dalam daftar situs warisan dunia bahaya, hal ini dikarenakan banyaknya dampak negatif yang diberikan oleh fenomena *overtourism* ini.



Bagan Kerangka Konseptual



Sumber :Penulis, 2024.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dan disajikan secara deskriptif analitik. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan teknik dan proses penyelidikan non statistik dalam pengumpulan data tentang fenomena sosial (McNabb, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan membantu penulis mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang diteliti melalui data berupa kata-kata dan gambar.



2. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian (Khasanah, 2021). Data ini mencakup informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan tersedia dalam berbagai sumber seperti laporan pemerintah, studi akademis, data industri, atau berita. Sumber data sekunder juga termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan, artikel, dan situs web yang terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber bacaan yang akan digunakan mencakup buku, jurnal, artikel, dokumen, serta situs web dan laporan resmi terkait topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta lainnya untuk menghasilkan argumen yang tepat. Teknik ini juga



memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis angka serta data statistik lainnya sebagai pendukung argumen dan hasil akhir penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional mengacu pada kolaborasi antara berbagai aktor dari tingkat nasional dan internasional yang bekerja bersama dengan membagi tugas dan membentuk kemitraan untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama ini melibatkan tindakan bersama dari aktor-aktor di tingkat lokal, regional, dan global. Dengan kata lain, kerja sama internasional melibatkan proses dimana kebijakan, strategi, dan rencana dikembangkan dan diimplementasikan secara terkoordinasi antara para aktor yang terlibat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Güdek-Gölçek, 2024).

Terdapat 3 (tiga) jenis kerja sama internasional yang berperan penting dalam mempromosikan kerja sama internasional yang efektif dalam memperkuat stabilitas global dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional secara luas, yaitu sebagai berikut :

1. Kerja Sama Bilateral

Dalam hubungan internasional, kerja sama bilateral umumnya dikenal sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Berkaitan dengan konsep hubungan bilateral, Didi Krisna dalam kamus politik internasional-nya (1993) menyatakan bahwa "Hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan hubungan saling menguntungkan atau hubungan timbal balik yang terjadi antara dua pihak atau dua negara,



dimana negara bertindak sebagai aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral tersebut”. Kerja sama bilateral ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, mempercepat proses penyelesaian masalah antara kedua negara yang terlibat, serta meningkatkan kemakmuran bersama. Dalam hal ini, perhatian lebih diberikan pada struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi agar menghasilkan hubungan yang harmonis antara kedua negara tersebut.

Kerja sama antara pemerintahan dua negara berdaulat dalam mencari solusi bersama untuk masalah yang melibatkan kedua negara melalui negosiasi dan perjanjian disebut sebagai kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral adalah bagian dari pola hubungan timbal balik antara dua negara, yang melibatkan beberapa proses berikut:

- a) Stimulus atau kebijakan yang diterapkan oleh negara yang menginisiasi kerja sama.
- b) Bagaimana kebijakan tersebut dipahami oleh para pengambil keputusan di negara penerima.
- c) Respon atau tindakan balik dari negara penerima terhadap kebijakan tersebut.
- d) Bagaimana para pengambil keputusan di negara yang menginisiasi kerja sama menanggapi atau mempersepsikan respon dari negara penerima.



Kerja sama bilateral dalam bidang pariwisata telah berkembang dengan pertukaran ekonomi dan budaya (Timothy, 2013). Hal ini berarti bahwa dua negara telah memperkuat hubungan mereka dalam bidang pariwisata. Perkembangan ini terjadi melalui berbagai kegiatan ekonomi, seperti investasi dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata, serta melalui pertukaran budaya yang melibatkan kegiatan seperti festival, pameran seni, dan pertunjukan. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan yang saling berkunjung tetapi juga memperkaya hubungan ekonomi dan budaya antara kedua negara.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk, tujuan serta manfaat dari kerja sama bilateral dalam bidang pariwisata, penulis akan mengambil salah satu contoh kerja sama bilateral dalam bidang pariwisata yang dilakukan oleh negara Filipina dan Tiongkok. Kedua negara ini bekerja sama untuk membangun industri pariwisata agar menjadi pilar ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan tangguh agar kedua negara ini dapat menjadi kekuatan pariwisata di Asia. Program dari kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan, menciptakan peluang kerja besar-besaran, serta mengundang investasi di semua sektor pariwisata, termasuk melanjutkan dan menambah penerbangan langsung ke destinasi utama dan yang sedang berkembang, serta mengadakan kegiatan promosi bersama (Adobo Magazine, 2023).



Program kerja sama kedua negara ini juga mencakup pertukaran administrator dan profesional pariwisata guna memperkuat pengembangan di bidang hotel, resor, kapal pesiar, pelabuhan, produk pariwisata, dan standar kompetensi terkait lainnya. Selain itu, kerja sama dalam keamanan pariwisata juga dilakukan untuk menjamin hak, kepentingan, dan keselamatan wisatawan yang mengunjungi negara masing-masing. Operator tur lokal dan agen perjalanan akan ikut serta dalam mempromosikan wisata kedua negara melalui bahan promosi yang menyoroti atraksi dan destinasi penting serta meningkatkan pertukaran informasi publik. Dalam kerja sama bilateral ini, kedua negara diharapkan untuk saling mendukung dalam menyelenggarakan pameran perjalanan, pameran pariwisata, dan inisiatif promosi lainnya, serta menumbuhkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam industri pariwisata (Adobo Magazine, 2023).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerja sama bilateral adalah bentuk hubungan antara dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Dalam perjanjian bilateral ini meliputi kesepakatan yang mencakup aspek politik, perdagangan ekonomi, budaya, pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu, hubungan bilateral yang ada antara kedua negara memiliki peran penting dalam mengembangkan masing-masing negara dan menciptakan banyak manfaat dalam berbagai



negosiasi serta dapat menciptakan forum untuk pertukaran gagasan dan pertukaran teknologi seperti pertukaran fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara dengan persetujuan keduanya (Goldstein, 2003).

Secara keseluruhan, kerja sama bilateral dalam bidang pariwisata mencerminkan pentingnya hubungan saling menguntungkan antara dua negara untuk memperkuat sektor pariwisata dan mendukung pembangunan ekonomi bersama.

2. Kerja Sama Multilateral

Multilateralisme adalah pola kerja sama atau inisiatif yang melibatkan setidaknya tiga negara atau lebih. Kerja sama multilateral diupayakan ketika negara-negara yang terlibat percaya bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan mereka yang saling bertentangan dapat diatasi melalui proses negosiasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat (Kim, 2013). Dengan demikian, tujuan utama dari multilateralisme adalah mencari solusi bersama untuk masalah yang kompleks dengan melibatkan partisipasi dari beberapa negara secara bersama-sama.

John Roggie dalam Dougherty & Pfaltzgraff (1997), mendefinisikan multilateralisme sebagai suatu bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang umum yang diterapkan dalam berbagai bentuk institusi, seperti organisasi internasional dan rezim internasional. Konsep ini juga mencakup ide tentang keteraturan internasional yang



belum sepenuhnya terwujud, yang merujuk pada upaya untuk menciptakan aturan dan norma yang berlaku secara internasional. Dengan melalui pendekatan multilateralisme melalui organisasi internasional, rezim internasional, dan partisipasi aktor internasional lainnya, konsep ini menegaskan pentingnya pembentukan masyarakat politik global dan proses integrasi dimana solidaritas atau kesatuan diupayakan dan diwujudkan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Kerja sama multilateral didasarkan pada sejumlah prinsip atau komponen yang menjadi ciri bagaimana negara-negara mengatur kerja sama mereka, baik di antara mereka sendiri maupun dengan aktor-aktor lainnya. Salah satu prinsip dasar dari multilateralisme adalah inklusi, yang mengacu pada gagasan bahwa negara-negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kerja sama yang mengatur urusan bersama. Inklusi tidak hanya melibatkan negara-negara, tetapi juga memperluas partisipasi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan dan kelompok yang terpinggirkan dalam pengaturan agenda atau pengambilan keputusan di lembaga-lembaga internasional. Inklusi ini menjadi penting bagi PBB dan organisasi internasional lainnya yang mengupayakan multilateralisme yang inklusif untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan lebih adil dalam proses global (Jokela et al., 2023).



Kerja sama multilateral dalam sektor pariwisata merujuk pada upaya kolaboratif antara berbagai negara dan organisasi untuk meningkatkan

sektor pariwisata, mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan, dan mengatasi tantangan bersama. Menurut UN Tourism, bentuk kerja sama ini berfokus pada mendukung negara-negara anggota dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan sosial-ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara mereka (UN Tourism, 2024).

Dengan demikian, multilateralisme tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi hubungan antarnegara tetapi juga merupakan alat penting untuk menemukan solusi bersama terhadap tantangan global yang kompleks, termasuk dalam sektor pariwisata.

3. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional sering digunakan sebagai strategi oleh aktor politik lokal, seperti pemerintah daerah, untuk meningkatkan kemampuan lokal, menyelesaikan tugas-tugas publik, atau mengatasi masalah bersama (Hulst et al., 2009). Ada berbagai pandangan dalam literatur tentang kerja sama regional, termasuk kategori yang melibatkan pemerintah lokal dan mengecualikan aktor swasta, serta konseptualisasi yang menekankan pada pengaturan institusional. Tema-tema yang sering muncul dalam literatur ini meliputi ekonomi skala, biaya transaksi, efektivitas dan efisiensi, pertumbuhan yang tidak merata, tantangan bagi ekonomi kapitalis, dan adaptasi institusional dari negara dan pasar yang beroperasi dalam kerangka neoliberal (Morales, 2020).



Kerja sama regional dianggap sebagai proses sosial dan geografis yang melibatkan berbagai tingkatan skala, yang secara mendalam terkait dengan pembangunan lokal dan regional. Ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya kerja sama regional sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal dan regional (Morales, 2020).

Kerja sama regional memberi manfaat yang mirip dengan multilateralisme, tetapi dalam skala lebih kecil, yaitu :

- a) Kerja sama regional membantu negara-negara dalam kawasan untuk mengatasi pasar domestik yang kecil dengan memungkinkan mereka mencapai efisiensi ekonomi dan spesialisasi produksi yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing produk mereka.
- b) Memberikan akses ke pasar yang lebih besar membantu negara-negara berkembang untuk memperluas industri yang sudah ada dan mendirikan industri baru yang mengekspor barang, sehingga mengurangi risiko kerugian jika pasar tertentu mengalami masalah.
- c) Meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang menghadapi tantangan baru seperti penggunaan teknologi baru.
- d) Mengurangi biaya transaksi internasional dan menghilangkan hambatan-hambatan non-tarif dalam perdagangan regional (ESCAP, 2004).



Kerja sama regional memiliki keuntungan tambahan dibandingkan dengan proses multilateral yang cenderung lambat dalam memberikan

manfaat jangka panjang. Negara-negara sering menghadapi tantangan jangka pendek dan menengah yang dapat diatasi melalui kerja sama regional, khususnya dalam perdagangan, transportasi, dan bidang lainnya. Kerja sama ini memfokuskan pada kebutuhan dan prioritas wilayah tertentu, serta mengurangi risiko keluarnya negara-negara dari upaya kerja sama tersebut. Perubahan dalam ekonomi global, seperti meningkatnya proteksionisme dari negara-negara maju dan peningkatan kerja sama antara negara-negara berkembang, menjadi alasan penting untuk memperkuat kerja sama regional. Ini membantu negara-negara untuk membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu global tanpa menghambat partisipasi dari negara-negara di wilayah lain yang ingin turut serta dalam upaya kerja sama ini (ESCAP, 2004).

Meskipun kerja sama regional memiliki berbagai keuntungan, terdapat juga beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah menemukan cara yang adil untuk mendistribusikan beban dan manfaat kerja sama regional. Ketegangan politik atau kurangnya kepercayaan antar negara bisa menghalangi kerja sama, sementara biaya koordinasi yang tinggi atau distribusi manfaat yang tidak merata dapat membuat beberapa negara enggan atau tidak mampu untuk berpartisipasi sepenuhnya. Negara-negara juga bisa menarik diri dari komitmen mereka jika mereka merasa kepentingan nasional mereka tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu, lemahnya institusi dan kurangnya mekanisme penegakan



hukum yang efektif dapat mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan hasil dari perjanjian kerja sama regional (ESCAP, 2004).

Meskipun demikian, banyak negara saat ini semakin tertarik untuk membentuk kelompok-kelompok regional karena mereka melihat peluang-peluang positif yang ditawarkan, seperti ekspansi pasar, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (Schiff & Winters, 2002).

Kerja sama regional dalam bidang pariwisata masih kurang mendapat perhatian khusus, meskipun memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan peningkatan perdagangan, industri, bisnis, serta kemajuan transportasi dan infrastruktur. Pendekatan realistis ini mengakui bahwa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, kolaborasi antar negara dalam isu-isu ekonomi dan komersial sangat penting untuk mendorong perkembangan pariwisata (Ghimire, 2001).

Kerja sama regional dalam bidang pariwisata bisa diwujudkan melalui berbagai cara. Misalnya, memperbaiki hubungan transportasi, menghapuskan pembatasan visa secara bertahap dan memudahkan pertukaran mata uang untuk mempermudah perjalanan antar negara dalam kawasan yang sama, sehingga meningkatkan kontak dan interaksi antar masyarakat. Beberapa blok regional telah membentuk komite dan kelompok studi khusus untuk menangani isu-isu pariwisata, menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan perhatian pada



sektor ini. Langkah-langkah kebijakan konkret yang telah diambil oleh beberapa blok regional juga menunjukkan bahwa kerja sama dalam bidang pariwisata bisa berjalan lebih jauh. Kebijakan ini dapat mencakup promosi bersama, pengembangan infrastruktur pariwisata, serta peningkatan layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata (Ghimire, 2001).

Dalam konteks kerja sama regional, pengembangan pariwisata dianggap sebagai tujuan kebijakan utama. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pariwisata akan menjadi salah satu sektor utama yang dapat memanfaatkan integrasi regional yang lebih erat untuk menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata regional bukan hanya tentang menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga tentang meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi regional secara keseluruhan melalui penghasilan dan retensi devisa. Melalui kerja sama yang erat antar negara di kawasan, pariwisata dapat berperan sebagai pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan wilayah pedesaan (Ghimire, 2001).

Dengan demikian, kerja sama regional dalam pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tertentu. Kerja sama ini tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian lokal dan regional, kerja sama ini juga dapat mendorong



perkembangan pariwisata, serta memperkuat konektivitas antarnegara dalam kawasan tersebut.

B. *Overtourism*

Industri pariwisata yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai belahan dunia dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang menentukan keberhasilan dan daya tarik sebuah destinasi. Salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan destinasi wisata adalah penerapan prinsip 3A, yang mencakup *Attraction* (daya tarik), *Accessibility* (aksesibilitas), dan *Amenities* (fasilitas).

Kusmalinda et al. dalam Elinda et al. (2021) berpendapat bahwa daya tarik wisata (*Attraction*) merupakan produk utama dari sebuah destinasi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Damanik dan Weber dalam Arjana (2016) juga menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah objek wisata (berwujud dan tidak berwujud) yang dapat memberikan kesenangan bagi wisatawan. Daya tarik wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan (Klasum et al., 2024).

Menurut Rusvitasari dan Solihin dalam Ramadhani et al. (2021), *Amenities* (fasilitas) adalah semua bentuk fasilitas pendukung yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mencakup serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, serta tempat berbelanja (Klasum et al., 2024).



Kemudian *Accessibility* (aksesibilitas), Menurut Soekadijo (2003) dalam Hidayat et al. (2017), aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai destinasi wisata baik secara geografis maupun teknis, serta ketersediaan fasilitas transportasi menuju destinasi tersebut. Menurut French dalam Khusnul dan Luchman (2017), faktor-faktor penting yang terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu tempuh, biaya perjalanan, frekuensi transportasi ke lokasi wisata, dan perangkat lainnya (Klasum et al., 2024).

Namun, seiring meningkatnya popularitas destinasi wisata tertentu, muncul tantangan besar yang dikenal dengan fenomena *overtourism*. Fenomena ini terjadi ketika jumlah wisatawan yang datang ke suatu lokasi melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh infrastruktur dan ekosistem lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan alam maupun kehidupan masyarakat setempat. *Overtourism* sering kali merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara prinsip 3A di atas, dimana daya tarik yang sangat besar (Attraction) memicu ledakan wisatawan, namun aksesibilitas (Accessibility) dan fasilitas pendukung (Amenities) tidak berkembang seiring dengan tingginya permintaan.

Overtourism merupakan sebuah fenomena yang semakin berkembang dan menarik perhatian di bidang pariwisata secara global. Istilah ini berasal dari penggabungan kata “over” dan “tourism” dan belum diakui secara resmi sebagai istilah akademis. Kata “*overtourism*” pertama kali digunakan pada tahun 2012 di Twitter oleh Harold Goodwin, seorang



profesor di Manchester Metropolitan University. Istilah ini merujuk pada masalah pariwisata yang terjadi di kota-kota Eropa seperti kota Barcelona dan kota Venesia, dimana pariwisata berdampak negatif (Goodwin, 2017). Sejak saat itu, istilah ini sering digunakan di media dan bahkan secara resmi digunakan dalam konferensi tingkat Menteri *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dan *World Travel Market* (WTM) pada tahun 2017 (Park, 2018).

Menurut Goodwin (2017), *overtourism* adalah kebalikan dari “pariwisata bertanggung jawab”. Artinya, “kualitas hidup atau pengalaman di suatu daerah sangat menurun karena terlalu banyak pengunjung”. Menurut Son, Park, Lee (2018), *overtourism* adalah fenomena negatif akibat terlalu banyak wisatawan dan termasuk dalam kategori “fobia wisatawan” dan “turisifikasi”. Laporan UNWTO menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan *overtourism* adalah jumlah pengunjung yang berlebihan, dampak negatif yang tidak terkendali dari pengunjung, dan dampak fisik yang tidak terkendali dari ekonomi pariwisata (UNWTO, 2018). Semua dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya yang dipertimbangkan dalam “pariwisata berkelanjutan” menjadi negatif di daerah yang mengalami *overtourism* (Kim & Kim, 2020).

Menurut sebuah studi (McKinsey & Company & World Travel & Tourism Council, 2017), terdapat beberapa tantangan yang timbul dari terjadinya *overtourism* ini yaitu penduduk lokal yang terasing, pengalaman wisata yang menurun, infrastruktur yang kelebihan beban, kerusakan alam,



atau ancaman terhadap budaya dan warisan (Peeters et al, 2018). Secara umum, dampak-dampak tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kategori utama yaitu, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan dampak sosial-budaya.

Dampak lingkungan meliputi kerusakan ekosistem dan sumber daya alam yang disebabkan oleh aktivitas wisata yang berlebihan, termasuk kerusakan alam. Dampak ekonomi seringkali mencakup ketidakseimbangan ekonomi antara daerah wisata dan non-wisata, serta pengalaman wisata yang menurun akibat infrastruktur yang kelebihan beban. Sedangkan dampak sosial-budaya berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat lokal, seperti penduduk lokal yang terasing, dan ancaman terhadap budaya dan warisan, yang terjadi karena adaptasi terhadap kebutuhan dan keinginan wisatawan.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga dampak tersebut :

1. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang terjadi akibat dari *overtourism* terutama disebabkan oleh peningkatan “penggunaan”, penggunaan yang dimaksud seperti penggunaan terhadap sumber daya, infrastruktur, fasilitas, dan/atau situs wisata. Beberapa “penggunaan” ini bisa bersifat mendadak atau sementara, seperti contoh kunjungan kapal pesiar, musim wisata yang singkat, atau acara tertentu. Efeknya bervariasi mulai dari polusi, kerusakan hingga kemacetan dan kepadatan yang berlebihan (Peeters et al, 2018).



Adapun beberapa macam dampak lingkungan yang diakibatkan dari fenomena *overtourism*, yakni :

- a) *Overtourism* menyebabkan penggunaan berlebihan sumber daya alam seperti tanah, air, dan energi, yang berdampak besar pada pencemaran air, tanah, udara, kebisingan, serta masalah limbah padat.
- b) *Overtourism* dapat merusak lingkungan karena permintaan yang meningkat secara tiba-tiba terhadap infrastruktur pariwisata, seperti fasilitas dan aktivitas komersial, mengarah pada investasi yang lebih banyak untuk infrastruktur pariwisata daripada untuk kebutuhan infrastruktur dasar yang diperlukan oleh penduduk lokal dan masyarakat umum di destinasi tersebut.
- c) *Overtourism* dapat merusak lingkungan dengan membangun infrastruktur pariwisata seperti bandara, pelabuhan pesiar, dan hotel yang mengubah lanskap alam atau budaya, serta menyebabkan pencemaran visual, terkait estetika infrastruktur, fasilitas, dan aktivitas pariwisata.
- d) *Overtourism* menyebabkan kerumunan wisatawan di rute, aktivitas, dan fasilitas tertentu yang terbatas, sehingga menyebabkan kemacetan pada infrastruktur, fasilitas, dan kegiatan komersial di destinasi tersebut.
- e) Peningkatan kunjungan wisatawan ke situs-situs alam, sejarah, dan arsitektur menyebabkan kepadatan yang berlebihan di tempat-



tempat tersebut, hal ini juga yang akan menimbulkan kerusakan pada situs-situs alam, sejarah, dan arsitektur tersebut (Peeters et al, 2018).

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang terjadi akibat dari *overtourism* juga disebabkan oleh peningkatan “permintaan”, permintaan yang dimaksud yaitu permintaan untuk barang dan jasa atau infrastruktur dan real estat. Dalam konteks ini, gentrifikasi adalah masalah yang sering terjadi. Gentrifikasi merupakan sebuah proses dimana sebuah kawasan yang awalnya dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah mengalami perubahan karena adanya investasi dan masuknya penduduk berpenghasilan lebih tinggi, yang mengakibatkan peningkatan harga pada semua jenis layanan dan produk, serta biaya hidup, sehingga penduduk asli terpaksa pindah ke daerah lain (Peeters et al, 2018).

Adapun beberapa macam dampak ekonomi yang diakibatkan dari fenomena *overtourism*, yakni :

- a) Peningkatan jumlah wisatawan yang berlebihan dapat mempengaruhi ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan untuk barang dan layanan pariwisata tertentu. Hal ini bisa menyebabkan harga naik dan pasokan berkurang bagi penduduk setempat, yang kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain seperti industri, pertanian, dan perumahan.



- b) *Overtourism* dapat sangat mempengaruhi ekonomi lokal dengan mengubah pola kunjungan wisatawan sepanjang tahun dan jenis pekerjaan yang tersedia. Karena banyaknya wisatawan, ekonomi menjadi sangat tergantung pada pariwisata, yang biasanya mengalami fluktuasi musiman. Akibatnya, pekerjaan di sektor lain mungkin berkurang karena ekonomi menjadi terlalu bergantung pada pariwisata. Ini bisa membuat ekonomi menjadi tidak stabil, terutama saat musim wisata sepi.
- c) *Overtourism* dapat berdampak secara ekonomi dengan meningkatkan permintaan mendadak terhadap infrastruktur, fasilitas, dan bisnis pariwisata, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan biaya perawatan yang lebih tinggi untuk fasilitas yang seharusnya mengutamakan kepentingan penduduk lokal.
- d) *Overtourism* dapat berdampak ekonomi dengan meningkatkan kepadatan, yang mengurangi aksesibilitas terhadap infrastruktur, lokasi, dan fasilitas. Hal ini bisa mempersulit penduduk dan wisatawan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti berbelanja atau pergi ke tempat kerja dalam perjalanan lokal mereka.
- e) Dampak ekonomi lainnya adalah penurunan citra destinasi yang dirasakan oleh wisatawan. Citra ini terpengaruh secara negatif ketika wisatawan mendapati destinasi terlalu ramai dan penuh sesak, mereka cenderung memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. Kepadatan dan kemacetan yang berlebihan bisa



membuat wisatawan merasa tidak nyaman dan terganggu. Pengalaman negatif ini bisa menyebabkan wisatawan memiliki kesan buruk tentang destinasi tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa tempat tersebut tidak lagi menarik atau layak untuk dikunjungi karena terlalu padat. Hal ini dapat berdampak pada citra destinasi secara keseluruhan, membuatnya kurang populer di kalangan wisatawan (Peeters et al, 2018).

3. Dampak Sosial-Budaya

Meningkatnya jumlah wisatawan dan permintaan terhadap fasilitas wisata menyebabkan berbagai dampak sosial-budaya. Salah satu dampaknya adalah wisatawan mulai mengunjungi dan menyebar ke lingkungan yang sebelumnya merupakan area pemukiman penduduk lokal. Hal ini mengakibatkan penduduk setempat merasa terpinggirkan (marginalisasi) karena lingkungan mereka yang dulu tenang sekarang dipenuhi oleh wisatawan. Selain itu, karena perbedaan nilai dan perilaku wisatawan, berbagai tradisi, situs, dan aktivitas mengalami perubahan. Akibatnya, keaslian suatu daerah berkurang dan identitas budaya juga mulai menghilang (Peeters et al, 2018).

Adapun beberapa macam dampak sosial-budaya yang diakibatkan dari fenomena *overtourism*, yakni :



- a) *Overtourism* membuat akomodasi dan layanan pariwisata, seperti yang ditawarkan melalui platform seperti Airbnb, mulai masuk ke area-area perumahan. Hal ini mengubah karakteristik area tersebut sehingga membuatnya kurang sesuai atau cocok bagi penduduk asli yang tinggal di sana.
- b) *Overtourism* juga dapat menyebabkan ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pengunjung akibat perbedaan signifikan dalam hal etnis, usia, jenis kelamin, kekayaan, nilai-nilai politik, sosial, agama, dan/atau moral. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpahaman dan bahkan konflik atau protes antara penduduk lokal dan pengunjung, terutama jika perbedaan tersebut sangat mencolok secara eksotis (Perbedaan yang sangat mencolok secara eksotis mengacu pada perbedaan yang sangat jelas dan mencolok dalam hal budaya, penampilan fisik, atau latar belakang yang dapat menarik perhatian atau menjadi titik fokus dalam konteks pariwisata atau pertemuan antarbudaya).
- c) Di daerah yang terkena *overtourism*, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kejahatan karena adanya tamu-tamu wisata yang mungkin berperilaku buruk atau bahkan terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini bisa mengurangi rasa aman di destinasi tersebut karena meningkatnya kasus kejahatan, kekerasan, serta masalah terkait seperti perilaku tidak pantas, penggunaan alkohol, prostitusi, perjudian, dan perdagangan narkoba.



- d) *Overtourism* bisa mengubah cara hidup dan nilai-nilai masyarakat lokal, seperti struktur keluarga dan pola konsumsi mereka. Perubahan ini dapat mengakibatkan pelemahan tradisi budaya, penurunan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta hilangnya semangat dan kebanggaan dalam komunitas, yang berujung pada hilangnya identitas budaya yang khas.
- e) Di bawah pengaruh *overtourism*, situs-situs bersejarah dan acara-acara kultural dapat mengalami perubahan atau modifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi para pengunjung dari luar, serta untuk mendukung keuntungan komersial (Peeters et al, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai konsep *overtourism*, konsep tersebut akan digunakan dalam penelitian ini karena keterhubungan dengan tema yang penulis angkat. Penelitian ini akan menggunakan konsep *overtourism* untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana gambaran umum dan dampak dari fenomena *overtourism* di Kota Venesia, Italia. Penggambaran dan penjelasan tersebut tentunya berdasarkan dengan data-data yang kredibel dan sesuai dengan fenomena penelitian yang diangkat oleh penulis.



C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Lena Pech (2022)	<i>“We need change!: a study of the participation of social movements in the governance of overtourism in Venice”</i>	Penelitian ini membahas bagaimana kota Venesia dianggap sebagai contoh ekstrem dari <i>overtourism</i> , dimana dampak negatif yang dihasilkan sangat meresahkan penduduk lokal. Hal ini diperparah oleh ketidakpuasan penduduk lokal terhadap cara pariwisata diatur oleh pemerintah setempat. Sebagai respons, terbentuklah berbagai gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki situasi tersebut. Penelitian ini meneliti sejauh mana gerakan sosial berpartisipasi dalam dalam tata kelola <i>overtourism</i> di kota Venesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial ini berusaha untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek tata kelola pariwisata, seperti penetapan agenda, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Mereka juga berperan sebagai produsen pengetahuan untuk mendorong kebijakan berbasis bukti dan bertindak sebagai pengawas kebijakan yang diterapkan. Namun, partisipasi mereka menghadapi berbagai hambatan, terutama kurangnya perhatian dari



			<p>pemerintah dan ketidaksediaan pemerintah untuk berdialog dengan kelompok lokal. Karena hambatan ini, gerakan sosial sering kali beralih ke bentuk partisipasi politik yang tidak konvensional, seperti demonstrasi dan okupasi, untuk menyuarakan pendapat mereka. Beberapa kelompok bahkan membentuk oposisi politik terhadap pemerintah saat ini di kota Venesia dan berpartisipasi dalam pemilihan lokal untuk memperjuangkan kebutuhan penduduk lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.</p>
2.	Matgorzata Kryczka (2019)	<p><i>“Overtourism vs. Sustainable Development of Tourism. Attempts to Handle Overtourism Following the Example of Venice”</i></p>	<p>Penelitian ini menguraikan pentingnya penanganan <i>overtourism</i> sebagai isu yang semakin mendesak dalam industri pariwisata global, sehingga diperlukan pendekatan yang tepat dalam manajemen dan pembuatan kebijakan untuk mengatasi dampaknya, serta dengan mempertimbangkan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kota Venesia dipilih karena telah mengalami tantangan yang signifikan akibat arus wisatawan yang berlebihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum cukup untuk menghindari konsekuensi jangka panjang dari <i>overtourism</i>, baik di kota Venesia maupun destinasi</p>



			lainnya di Eropa yang terkena dampaknya.
3.	Suah Kim dan Namjo Kim (2020)	“A Social Cost-Benefit Analysis of the Vehicle Restriction Policy for Reducing Overtourism in Udo, Korea”	Penelitian ini membahas mengenai dampak <i>overtourism</i> yang meningkat di Pulau Udo, Jeju, Korea Selatan, yang mengakibatkan konflik di antara pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah setempat menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan. Melalui kerangka analisis biaya-manfaat, penelitian ini menilai biaya sosial dan manfaat kebijakan publik untuk mengendalikan <i>overtourism</i> di Pulau Udo tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat bersih dari kebijakan ini cenderung meningkat seiring waktu, menegaskan keberhasilan dan kebutuhan kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

(Sumber : Penulis, 2024).

Tabel di atas berisikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam memberikan referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yaitu, *“We need change!: a study of the participation of social movements in the governance of overtourism in Venice”* yang ditulis oleh Lena Pech (Pech, 2022). Penelitian yang ditulis oleh Lena Pech ini berbeda dengan penelitian



penulis karena penelitian ini menyoroti partisipasi gerakan sosial dalam tata kelola *overtourism* di kota Venesia, dengan meneliti bagaimana kelompok-kelompok lokal berperan aktif dalam proses penetapan kebijakan dan mengatasi hambatan dalam partisipasi mereka sedangkan penelitian penulis akan melihat bagaimana upaya pemerintah Italia melalui kerja sama internasional dalam mengelola *overtourism* di kota Venesia.

Penelitian kedua yaitu “*Overtourism vs. Sustainable Development of Tourism. Attempts to Handle Overtourism Following the Example of Venice*” yang ditulis oleh Matgorzata Kryczka (Kryczka, 2019). Penelitian ini tentunya berbeda dengan dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus membandingkan dampak *overtourism* dengan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan penekanan pada strategi yang telah dilakukan di kota Venesia sebagai contoh. Sedangkan, penelitian penulis lebih terfokus pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Italia dalam mengelola dampak *overtourism* di Venesia melalui kerja sama internasional.

Penelitian ketiga yaitu, “*A Social Cost-Benefit Analysis of the Vehicle Restriction Policy for Reducing Overtourism in Udo, Korea*” yang ditulis oleh Suah Kim dan Namjo Kim (Kim & Kim, 2020). Penelitian yang ditulis oleh Suah Kim dan Namjo Kim ini berbeda dengan penelitian penulis karena fokusnya pada analisis biaya-manfaat sosial dari kebijakan pembatasan kendaraan di Pulau Udo, Jeju, Korea Selatan, untuk mengatasi *overtourism*, sementara penelitian penulis membahas upaya pemerintah



Italia dalam mengelola *overtourism* di Venesia melalui kerja sama internasional. Pendekatan Suah Kim lebih spesifik pada aspek transportasi lokal, sedangkan penelitian penulis mencakup kebijakan lintas negara dengan penekanan pada pelestarian warisan budaya di kota Venesia.

